

DEKLARASI ANIES – MUHAIMIN DAN KONFLIK IDEOLOGI NU VS PKS DI PENTAS POLITIK NASIONAL

Muhammad Dalle
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
muhammaddalle96@gmail.com

Abstract

The conflict between NU and PKS is an ideological battle rooted in political competition, notably surrounding the 2024 presidential election. Escalating tensions involve Nasdem's support for Anies Baswedan and PKS's selection of Muhaimin Iskandar as vice-presidential candidate. NU figures derisively depict the Anies-Muhaimin pair, backed by PKS, as Wahhabi groups associated with the Muslim Brotherhood. Utilizing power cube theory and Gramsci's hegemony, this research analyzes the conflict, revealing internal disputes within PKB across various power layers. The conflict extends nationally and internationally, involving key figures and transnational issues. However, attacks on the Anies-Muhaimin coalition rely on outdated narratives. NU's actions, stemming from Gus Dur's legacy, are influenced by political factors and personal interests. Hidden conflicts between NU and Muhammadiyah are also pivotal. The author suggests NU cadre unity, resolving longstanding conflicts, and Islamic party unity to confront perceived nepotism, secularism, and oligarchic favoritism in the regime.

Keywords: The Anies-Muhaimin declaration, NU vs PKS conflict, Indonesian politics

Abstrak

Konflik antara NU dan PKS merupakan pertarungan ideologis yang berakar dalam persaingan politik, terutama seputar pemilihan presiden 2024. Ketegangan yang meningkat melibatkan dukungan Nasdem terhadap Anies Baswedan dan pemilihan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden oleh PKS. Tokoh NU menggambarkan pasangan Anies-Muhaimin, yang didukung PKS, sebagai kelompok Wahabi terkait dengan Ikhwanul Muslimin. Dengan menggunakan teori kubus kekuasaan dan hegemoni Gramsci, penelitian ini menganalisis konflik, mengungkap pertentangan internal di PKB di berbagai lapisan kekuasaan. Konflik ini meluas secara nasional dan internasional, melibatkan tokoh kunci dan isu transnasional. Namun, serangan terhadap koalisi Anies-Muhaimin bergantung pada narasi usang.

Tindakan NU, berasal dari warisan Gus Dur, dipengaruhi oleh faktor politik dan kepentingan pribadi. Konflik tersembunyi antara NU dan Muhammadiyah juga penting. Penulis menyarankan persatuan kader NU, penyelesaian konflik lama, dan persatuan partai Islam untuk menghadapi nepotisme, sekularisme, dan keberpihakan oligarki dalam rezim.

Kata kunci: Deklarasi Anies –Muhaimin, konflik NU vs PKS, Politik Indonesia

Article History: *Received 22 July 2023, Revised: 15 Agust 2023, Accepted: 01 November 2023, Available online 30 December 2023*

Pendahuluan

Dalam buku karya Anwar Al Jundi berjudul “Pembaratan di Dunia Islam” iya mengatakan bahwa agenda besar barat atas Islam adalah menimbulkan keraguan pada Syariat Islam. Penerapan hukum positif sebagai sistem yuridis di negara muslim adalah contohnya. Sejak masuknya Napoleon di Mesir, dunia Islam terwarnai dengan produk hukum Barat. Hal ini dilakukan agar ideologi Islam tidak menghalangi barat untuk merampok kekayaan negeri negeri muslim.

Lord Cromer tahun 1892 menyerang Syariah Islam di Mesir, dan pikirannya iya tuangkan dalam bukunya *Modern Egypt* yang terbit tahun 1907. Sehingga banyak penulis muslim melawan serangan itu. 30 tahun kemudian, tepatnya Tahun 1937 pada kongres hukum di Den Haag menyatakan Syariah Islam adalah sistem mandiri dan bukan bagian dari undang undang Romawi. Namun pada saat yang sama pemikiran pemikiran Barat banyak menyerang Syariah Islam dengan mendikotomi agama dan negara.

Ali Abul futuh menerbitkan karya pertamanya berjudul syariah islam dan hukum positif tahun 1905. Sedangkan majalah Al Manar mencatat bahwa masuknya Napoleon ke Mesir telah menindas para ulama dan memaksa mereka mensosialisasikan hukum ala Barat yang dibawanya. Sejarah juga mencatat Kemal Attaturk melakukan infiltrasi ke dalam masyarakat Islam di Turki dengan memasukkan ajaran hukum sipil Swiss.

Para orientalis penulis genre filsafat agama seperti Hamilton Gibb, Arnold Toynbee, Dr. Wilfred Cantwell Smith, Adam Mitz, sepakat bahwa kesatuan antara agama dan politik negara adalah kunci kekuatan Islam dan Islam dan negara seperti suami dan istri yang saling menyempurnakan (Jundy, 1993).

Surat kabar eropa Sunday Telegraph tahun 1990 pernah menulis “*apakah islam akan mengubur kita?*”, surat kabar NewsWeek tahun 1995 menulis “*Eropa yang muslim*” dan “*the Financial Times*” tahun 1990, ketiga tulisan itu berisi kekhawatiran Eropa atas kebangkitan Islam sehingga harus dimusnahkan dengan meluncurkan bom nuklir ke Mekkah misalnya.

Presiden Amerika yaitu Nixon tahun 1985, mengajak Uni Soviet melawan fundamentalisme Islam. Margaret Thatcher tahun 1989 di pertemuan NATO menyatakan perlu membasmi Islam, dan Henry Kissinger pada 1990 menyatakan demikian, dan Presiden Amerika George W. Bush pasca peristiwa 11 september bahwa itu adalah perang salib awal di abad 21. Dan melayangkan tudingan ke negara negara Islam sebagai pabrik teroris (Khadhar, 2005).

Dalam buku *mengapa umat islam dilanda perpecahan* karya Imam Munawwir dijelaskan bahwa penyebab perpecahan umat Islam di Indonesia adalah fanatisme. Orang NU yang awam biasanya merasa paling Ahlusunnah diantara kemlompok lain, sebaliknya orang Muhammadiyah yang awam merasa paling benar bersyariah karena berpegang pada Quran dan Hadis. NU dan Muhammadiyah sering terbawa konflik furu'iyah yang tidak perlu.

Disisi lain Persis dan Wahabi (salafi) senang dengan konflik perdebatan dengan menantang siapapun dan mengklaim golongan di luar mereka sebagai keliru dalam beragama (Munawwir, 1985).

Th. Sumartana dalam tulisannya bertajuk “*Pemberlakuan Syariat Islam di Indonesia*” mengeluhkan buruknya hubungan NU dan Muhammadiyah yang sering terpicu konflik fanatisme

golongan padahal keduanya adalah benteng Islam moderat. Maka dari itu Th. Sumartana berkata jika konflik NU dan Muhammadiyah tidak usai maka apa yang dikatakan oleh Munawar Fuad Noeh bahwa Islam kanan dapat mengambil kesempatan melahirkan negara Islam (Sumartana, 2005).

Sebenarnya kelompok kelompok Islam di Indonesia punya 1 mimpi yang sama seperti partai Islam berbasis NU seperti PKB dan PPP sehaluan dengan ormas fundamental seperti PKS, dan FPI, laskar Jihad, dan Mujahidin, semuanya ingin isi piagam Jakarta terwujud yaitu tegakkanya Syariah Islam, namun bedanya PKB dan PPP ingin cara yang evolusioner top – down, sedangkan kelompok kanan seperti PKS dan lain lain ingin cara revolusioner top – up (Romli, 2006).

Dalam majalah tempo edisi 15 Oktober 2023 hal 24, dikatakan bahwa 3 calon presiden yaitu Anies baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto semuanya berebut suara kaum Nahdiyyin dengan berusaha mendekati tokoh NU. Prabowo dan Ganjar berusaha melobi Khofifah gubernur Jawa Timur yang berpengalaman memimpin Fatayat NU selama 20 tahun. Jawa Timur menjadi lumbung suara nasional dengan jumlah pemilih sekitar 31 juta lebih berada diperingkat kedua setelah Jawa Barat (Tempo, 2023).

Anies baswedan sebagai salah satu calon presiden pada pilpres 2024, yang diusung oleh partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera secara mengejutkan telah mengumumkan calon wakil presidennya yaitu Muhaimin Iskandar ketua Partai Kebangkitan Bangsa. Pemilihan Muhaimin Iskandar belakangan diketahui publik atas inisiatif Surya Paloh yang melihat PKB sebagai lumbung suara Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Masuknya PKB dalam barisan partai pengusung anies, mempertemukan PKB sebagai partai NU dengan PKS yang punya ideologi berbeda dari NU sendiri. Sehingga banyak tokoh NU yang melempar pernyataan sinis kepada pasangan Anies - Muhaimin yang disokong PKS sebagai Wahabi atau sarang Ikhwanul Muslimin.

Konflik ideologi antara NU dan PKS bukan rahasia selain persaingan politik kedua gerakan ini juga berbeda dari aspek historis dan konsep konsep bernegara.

Dalam buku berjudul *Relasi Islam Politik dan Kekuasaan*, karya Abd. Halim disebutkan bahwa PKB bukanlah partai berasaskan Islam meskipun didirikan oleh para ulama NU. pada mulanya basis masanya adalah kalangan santri dari daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan. Namun tidak lama kemudian banyak para santri yang tidak hanya fokus pada dunia pesantren tetapi menempuh juga pendidikan di kampus kampus umum sehingga melahirkan varian intelek dan politisi aswaja baru inilah penyebab melebarnya dukungan pada PKB bahkan kalangan non muslim pun bersimpati pada PKB.

Adapun kepengurusannya tidak jauh beda dengan PKS yang terbagi 2 yaitu Dewan Syuro yang terdiri dari 12 ulama dan Dewan Tanfiz yang terdiri dari para politisi muda yang pernah aktif di PMII (Halim, 2013).

Dari sisi branding atau pembangunan image politik PKB banyak bergantung pada figur Kiyai yang memimpin pondok pondok pesantren sehingga santri santri yang otomatis didoktrin menjadi Islam ala NU menjadi simpatisan mereka karena mengikuti (taqlid atau itiba') kiyai adalah sebuah sakralitas dalam beragama.

Max Weber yang dikutip oleh Suryo Sakti Hadiwijoyo dalam bukunya berjudul *Daerah Istimewa yogyakarta dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, bahwa jenis kekuasaan itu ada 3, yaitu: 1) kekuasaan tradisional seperti para raja yang kekuasaannya terwariskan secara adat kepada keturunannya, 2) kekuasaan kharismatik yaitu kekuasaan atas dasar kekuatan figur apakah itu figur hero atau orang suci atau status sosial lain yang punya pamor dalam masyarakat, 3) kekuasaan legal yaitu penguasa yang lahir dari sistem pemilihan resmi menurut suatu negara (Hadiwijoyo, 2013). Dalam hal ini PKB menggunakan kekuasaan tradisional karena jabatan kiyai terwariskan dan juga kekuasaan kharismatik karena loyalitas masyarakat pada suatu pesantren sangatt ditentukan oleh figur pemimpinnya.

Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan konflik NU vs PKS diantaranya 1) Penelitian Agus Wahyudi berjudul PKS DAN NU (Studi Kasus Tentang Penguatan Jejaring PKS Dalam Menembus Basis NU di Kabupaten Trenggalek dalam Pemilihan Umum 200, yang mengkaji gesekan NU dan PKS dari segi Kultural iya menemukan bahwa di Trenggalek PKS berhasil merebut suara pemilih NU di beberapa desa pada pemilu 2009, masyarakat Trenggalek yang berbudaya Islam mataraman memberikan titik temu antara PKS dan NU, sebab masyarakat mataraman lebih independen tidak dipengaruhi elit dalam memilih calon pemimpin dan dibalik watak budaya mereka yang sinkretik namun terbuka dengan perbedaan (Wahyudi, 2013). 2) Penelitian Ach. Basyir yang berjudul Ideologi Politik Dilematis Partai keadilan Sejahtera (PKS) antara Gerakan Tarbiyah dan Pagmatisme, yang menyimpulkan bahwa PKS memilih isu yang populer dan diangkat sebagai visi perjuangan dibanding memperjuangkan ideologi partainya sendiri, ini menyebabkan perlahan namun pasti PKS menjadi partai nasionalis terbuka bahkan sekuler, karena mengutamakan pragmatisme kekuasaan yaitu meningkatnya pemilih (Basyir, 2014). 3) skripsi Miftahuddin yang berjudul Pengaruh Ikhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia, yang menyimpulkan bahwa PKS punya mimpi yang sama dengan Ikhwanul Muslimin tetapi struktur oragnisasi dan cara yang ditempuhnya berbeda, dan tidak ada kaitan langsung antara PKS dan Ikhwannul Muslimin, proses terjadinya pengaruh ikhwan pada PKS adalah kembalinya para sarjana dari timur tengah lalu melakukan kaderisasi dan mengajarkan buku buku karya tokoh Ikhwanul Muslimin, menerjemahkannya, dan menerbitkannya serta memberikan kata pengantar, tetapi PKS menyeleksi pemikiran pemikiran itu secara progresif atau mencari yang relevan dengan tantangan ke-Indonesiaan (Miftahuddin, 2008).

Adapun artikel ini bertujuan untuk mengungkap dan memahami hakikat konflik ideologi NU vs PKS akibat

dideklarasikannya pasangan Anies dan Muhaimin untuk capres dan cawapres pada pilpres 2024 nanti.

Penelitian ini dikaji dengan menggunakan teori kubus kekuasaan atau *powercube*, sebagaimana disampaikan Abdul Chalik dalam bukunya “*Pertarungan Elite dalam Politik Lokal*”, teori ini berfungsi mengidentifikasi level, dimensi dan wujud dari sebuah kekuasaan dan menggali keterkaitannya.

Pertama, Bentuk berbicara bagaimana kekuasaan itu memperlihatkan drinya, baik secara *visible power*, *hidden power*, ataupun *invisible power*. **Kedua**, dimensi berbicara batasan atau wilayah pertempuran antara dua atau lebih kekuatan politik yang bisa dirumuskan dalam 3 hal yaitu *close space*, *invited space* dan *calimed power*. **Ketiga**, level adalah berbicara tataran dimana tindakan politik terjadi dari sudut pandang vertikal apakah lokal, nasional atau internasional (Chalik, 2016).

Setelah diidentifikasi kemudian dijeneralisasi dengan teori hegemoni Gramsci. Teori hegemoni Gramsci secara singkat adalah menguasai atau mengalahkan lawan lewat wacana, baik itu wacana politik, kultur masyarakat, ataupun ideologi sebuah gerakan, yang ada dalam masyarakat yang ada. Pamor suatu kelompok dimata masyarakat ditentukan oleh dua hal yaitu kekuatan mendominasi dan kepemimpinan moral dan intelektual (Yohanes Sehandi, 2016). Dalam dunia sosiologi hegemoni adalah usaha melanggengkan power, yaitu dengna mempengaruhi atau menundukkan kelompok lain melalui wacana moral, politik, dan kebudayaan dari kelompok yang ingin berkuasa (Endraswara, 2018).

Penolakan Intelek NU atas Penegakkan Syariat Islam di Indonesia

Menurut Abdurahman Wahid dalam tulisannya bertajuk musuh dalam selimut, bahwa Indonesia menjadi medan juang dua kelompok garis keras transnasional yaitu Wahabi dan Ikhwanul Muslimin atau perkawinan antara keduanya. Menurutnya 2 atau 3 kelompok ini punya agenda yang anti kebangsaan dan 20 tahun terakhir mereka mulai berhasil

merubah wajah Islam Indonesia yang lembut menjadi liar dan ganas.

Dengan dalih tarbiyah dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar mereka berhasil merebut simpati kaum muslimin Indonesia. baik dari kaum rendahan sampai yang berpendidikan tinggi sekalipun sebabnya karena salah memahami esensi Islam dan nilai spiritualitas. Mudah terpesona oleh jargon gaya berpakaian dan simbol ismbol keagamaan yang mereka bawa.

Menurut Abdurahman Wahid ada 2 motif para penyebar ajaran garis keras pertama rayuan simbol agama yang mereka tampilkan karena rendahnya wawasan keislamannya dan kedua mereka yang sengaja menyebarkan demi terlampiaskan hawa nafsunya misalnya mendapat bayaran, kekecewaan politik dan ekonomi. Ustadz Aunur Rofiqi dosen di pasca sarjana UIN Malang pernah menceritakan bahwa ada orang yang tadinya NU tiba tiba beralih secara ekstrim menjadi Hizbut Tahrir, ketika ditanya tentang sikapnya, iya menjawab “karena di NU saya tidak mendapat jabatan”.

Abdurahman Wahid juga menyebutkan sokongan petrodollar dari Saudi telah ikut memperkuat infiltrasi Wahabi dan Ikhwanul Muslimin di Indonesia, misalnya para dai yang digaji oleh Saudi guna menyuarakan paham Wahabi, dan DDII atau Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia juga di danai oleh Rabithath Al Alam Al Islami untuk memuluskan gerakan gerakan intoleran. Sementara itu LDK atau Lembaga Dakwah Kampus dengan sistem tarbiyah berhasil ditembus oleh PKS bahkan juga Wahabi yang menyebar ustadz ustadznya memberi kajian di Universitas Umum (contohnya mesjid dan kampus UGM di Jogjakarta dan Universitas Brawijaya di Malang seorang ustadz Wahabi Kota Malang mengaku sudah delapan tahun mengadakan kajian di fakultas tehnik Universitas Brawijaya). Selain itu PKS membangun banyak mesjid mesjid dengan sokongan dana dari Arab tentunya akan menjadi corong penyebaran ideologinya (A. Wahid, 2009).

Sikap NU sejalan dengan Muhammadiyah yang gerah dengan masuknya paham paham transnasional yang membawa

ajaran Islam yang lebih mengarah pada paham Khawarij yang intoleran.

Menurut Alwi Shihab Muhammadiyah dalam kongres Al-Islam di Surabaya tahun 1924 tegas membantah afliasinya dengan Wahabi. perbedaan mencolok Muhammadiyah dan Wahabi adalah dalam masalah Tasawuf, Ahmad Dahlan dan Muhammad Abduh yang menjadi rujukan pemikirannya sama sama menerima konsep tasawuf, berbeda dengan Wahabi yang mengharamkan tasawuf. Menurut Alwi Shihab ajaran Ahmad Dahlan senantiasa mengutip ajaran para tokoh sufi seperti Hasan Albasri, Al Muhasibiy, Yahya bin Muaz.

Alwi Shihab berkata bahwa George Makdisi menyebutkan bahwa Ibn Taimiyyah adalah murid Tareqat Qadiriyyah, Ibn Taimiyyah menaruh respek yang dalam terhadap tokoh tokoh tasawuf sekaliber Al Junaid, Al Tustari, dan Al Ghazali. Bahkan menurut George Makdisi, Ibn Taimiyyah telah menulis buku tasawuf yaitu "*Al-Tuhfah Al Iraqiyah Fi Al A'mal Al Qalbiyyah* (Shihab, 1999).

Nahdatul ulama adalah organisasi yang paling anti dengan penegakkan Syariat Islam bukan karena mereka anti Islam tetapi semangat dari gerakan itu di dominasi ajaran Salafi Wahabi, yang memang berdirinya, bertujuan menjaga intelektualitas Islam tradisional dan tradisi Islam Ahlusunnah Waljamaah. Tadinya NU menentang modernisme Islam di indonesia, namun sejak 1930 NU telah menerima *status quo* dalam politik Indonesia karena perkembangan organisasinya. Abdurahman Wahid juga menolak ICMI dengan kelakarnya "biarkan saya mengurus pedagang jalanan" (Woodward, 1998). Hal ini karena iya berprasangka bahwa ICMI adalah kendaraan pak harto untuk menunggangi kaum islamis.

Kekhawatiran tokoh tokoh NU terhadap PKS

Ketika pasangan Anies - Muhaimin mendeklarasikan sebagai bakal calon presiden dan wakil presdiden 2024, rame rame tokoh NU secara fulgar maupun dengan gaya sinisme, menyerang Muhaimin Iskandar. Ada yang bermotif kekecewaan

masa lalu dari keluarga Gus Dur dimana Muhaimin dianggap mengkuudeta Gus Dur (Saputra, 2019), ada juga kekhawatiran akan ide negara Islam dari tokoh tokoh NU misalnya Gus Chalil Tsaqf ketua PBNU seolah olah ingin menghantam muhaimin yang satu kubu bersama PKS.

Pertama, konflik Muhaimin - Gus Dur adalah hukum legal dan telah diputuskan oleh pengadilan yang memenangkan muhaimin sehingga menjadi ketua PKB sampai hari ini. Kedua kekhawatiran tokoh tokoh NU akan bahaya ide negara Islam Ikhwanul Muslimin dalam tubuh PKS tidak pernah terbukti.

Dalam tesis Ichwan Arifin “berjudul Kiai dan Politik; Studi Kasus Perilaku Politik Kiai dalam Konflik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pasca Muktamar II Semarang”, dijelaskan bahwa konflik Gus Dur - Cak Imin adalah konflik ke tiga dalam ketegangan internal PKB, kalau 2 konflik sebelumnya kubu Gus Dur selalu menang maka pada konflik ketia ini, kubu Gus Dur kalah. Melalui putusan Mahkamah Agung No. 441/kasasi/PDT.SUS/2008 yang menyatakan bahwa pemecatan Muhaimin Iskandar oleh Gus Dur dari jabatan ketua umum dewan tanfiz DPP PKB adalah tidak sah karena bertolak belakang dengan AD/ART partai, dan harus mengembalikan nama baik dan posisi Muhaimin Iskandar dalam partai sesuai amanat keputusan kementerian No M-02.UM.06.08 tahun 2005 tanggal 8 Juni 2005 yang dengan katalain status PKB harus dikembalikan sesuai amanat hasil muktamar II Semarang).

Konflik yang terulang pasca deklarasi Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies Baswedan, menyulut perseteruan lama yaitu trah Gus Dur bvs cak Imin, dan cara merebut simpati public (masyarakat dan wacana politik) terlihat sama yaitu menyeret kiyai kiyai NU ternama. Menurut Ichwan Arifin para kiyai itu hanya dijadikan kendaraan merebut legitimasi poitik yang bersumber dari simpati rakyat sebagai pemilih. Selain itu juga dalam tubuh PKB terdalam Dewan Syuro yang berisi para Kiyai berpengaruh. Namun sering kali terjadi dualisme antara

Dewan Syuro dan Tanfiz karena Tanfiz dipandang tidak lagi mematuhi dawuh kiyai dalam Dewan Syuro atau sebaliknya karena para kiyai di dalam dewan syuro punya kepentingan sendiri yaitu meloloskan orang dekatnya atau orang yang didukungnya (Arifin, 2008).

Kedua, Ikhwanul Muslimin didirikan Hasan Albanna yang beraqidah Ahlusunnah Wal Jamaah seperti para Masyaik Al-Azhar, namun dipertengahan jalan Ikhwan diinfiltrasi oleh orang orang Syiah sehingga berubah menjadi bringas menembak mati para petinggi Mesir yang punjaknya adalah tertembaknya Anwar Sadat, dan pada akhirnya Hasan Albanna pendiri Ikhwan pun dibunuh.

Kalau memang PKS itu sarang pergerakan Ikhwan maka PKS pasti sudah menembak mati Jokowi dan Maruf Amin karena dianggap jahiliyyah tidak berhukum dengan hukum Allah dan bukan pemerintahan yang berlandasa sistem Allah demikian pemikiran Ikhwan radikal dari Sayyid Qutub pentolannya.

Satu hal yang diwarisi PKS di Indonesia dari gerakan Ikhwan adalah Usrah (akomodasi ide ide berbagai ulama) atau Tarbiyah yang merupakan adopsi sistem kaderisasi ala Hasan Albanna, dan tokoh moderat Ikhwan yang lain seperti Syekh Mushtafa Masyhur, Muhammad Al-Ghazali, Yusuf Qardhawi dll (Damanik, 2013). Hal ini tidak bisa dijadikan alasan bahwa PKS itu berbahaya.

M. Amin Nurdin, Ali Thaufan Dwi Saputra, dan Adi Prayitno, dalam bukunya *Prahara Partai Islam; Komparasi Konflik Internal PPP dan PKS*, menjelaskan bahwa PKS sering dicap radikal dan sarang Ikhwanul Muslimin, sehingga banyak tokoh yang berusaha menepis anggapan itu.

Tamsil Linrung salah satu pentolan KPPSI sulsel dan kader PKS serta jajaran ketua MPR saat ini, menepis tuduhan bahwa PKS radikal dan ingin meruntuhkan negara pancasila, menurut Tamsil PKS memperjuangkan penerapan nilai Islam yang

substantif dan memperbaiki negara dengan nilai Islam. Sementara Firman Noor dalam risetnya menunjukkan bahwa PKS masuk dalam kategori gerakan Islam fundamental-nasionalis.

PKS sendiri berusaha menepis tuduhan bahwa mereka partai Ikhwanul Muslimin, dengan cara menunjukkan pada masyarakat bahwa mereka adalah representasi kaum Islam moderat di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah. Sehingga mereka mampu menciptakan tren positif sejak 1999-2014 di setiap pemilu suara pemilih PKS senantiasa meningkat (Nurdin, Saputra, & Prayitno, 2019).

Dalam majalah tempo edisi 15 Oktober 2023 hal24, saat Anies dan Muhaimin bersama banyak kader partai PKS dan PKB mengunjungi pesantren An Nuqayyah di Madura yang berdiri sejak 1887, mereka berusaha menjelaskan dan menampik segala tuduhan yang dilayangkan ke Anies Baswedan.

Anies mengatakan bahwa dirinya tidak berbeda dengan kaum Nahdhiyin umumnya yaitu merayakan Maulid Nabi saw, mengikuti tahlilan dan suka bershalawat juga.

Ahmad mabruri Juru bicara PKS misalnya menolak jika PKS dikatakan sebagai partai wahabi karena 6 oktober 2023 lalu dan tahun tahun sebelumnya juga parta PKS sering memperingati Maulid Nabi saw. Menurut Ahmad Mabruri perbedaan ideologi antara NU dan PKS justru menjadi power yang mengkonsolidasikan. Selain itu Anies juga seorang peziarah kubur sebagaimana pada tanggal 24 september 2023 lalu ia dan Muhaimin berziarah ke makam Pangeran Diponegoro di Makassar.

Syamsil Musqith pengasuh ponpes An Nuqayyah membenarkan bahwa ada ganjalan dari para kiyai NU dengan adanya dukungan PKS, namun para kiyai NU yakin Anies bukan kader partai PKS (Tempo, 2023).

Prinsip prinsip yang dipegang partai sama sekali tidak mencerminkan ajaran Ikwanul Muslimin yang radikal dan fundamental, misalnya dalam artikel Moh. Nurhakim berjudul “*Gerakan Revivalisme Islam dan Wacana Penerapan Syariah di Indonesia; Telaah Pengalama PKS dan Salafī*”, dijelaskan bahwa PKS memandang Syariah adalah hal yang harus ditegakkan dalam kehidupan individu, keluarga, maupun masyarakat dengan cara yang moderat meliputi aqidah, ibadah, muamalah, akhlak dan jinayah atau hudud. Cara moderat yang dimaksud PKS adalah dengan memperjuangkan formalisasi Syariah Islam melalui jalan konstitusi negara dan terjun dalam perjuangan legislasi (Moh. Nurhakim, 2011). Tidak sampai disitu saja, bahkan prinsip prinsip ini kemudian semakin pudar dan PKS justru mengarah pada keterbukaan partai.

Dalam buku *Nalar Politik NU dan Muhammadiyah; Over Crossing awa Sentris*, karya Suaidi Asyari dijelaskan bahwa PKS pernah dipimpin oleh tokoh NU yaitu Dr. Nurmahmudi Ismail, namun PKS gagal meraih treshold pemilu 1999 karena pemilih NU telah terpecah pecah suaranya ke dalam anak partai seperti PKB, PPP, dan PBB.

Periode berikutnya PKS merubah strateginya dengan merebut suara kaum Muhammadiyah bersamaan dengan dijabatnya posisi ketua umum oleh Prof. Hidayat Nurwahid seorang guru besar dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan punya akses kuat kepada kader kader Muhammadiyah dan merupakan orang baru di pentas politik reformasi (bukan tokoh politik lama dari orde baru).

Memang PAN yang didirikan Amien Rais tetapi karena dia partai terbuka maka nilai spiritualitas orang Muhammadiyah takterpenuhi, sementara PKS hadir memanfaatkan kegagalan Muhammadiyah dalam menciptakan kultur spiritual (seperti menciptakan liqa’-liqa’ dan menghidupkan mesjid) dan memperjuangkan Islam Progresif dan Modern melalui politik praktis (Suadi Asyari, 2010).

Dalam artikel Nur Wahid berjudul *Jejak Dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Memasuki Muhammadiyah; Mencermati Kasus di Yogyakarta Sebagai Fenomena Politik Dakwah*, Disimpulkan bahwa PKS dapat merebut simpati kader Muhammadiyah karena PKS berhasil memadukan dakwah dan politik yang akrab dengan Muhammadiyah secara historis. Dengan manhaj tarbiyahnya meliputi kegiatan, pendidikan dan intensitas pertemuan antara murid dan murabbi serta atribut yang mereka tampilkan berhasil merebut simpati kader kader Muhammadiyah yang progresif (N. Wahid, 2019).

Dalam buku karya Desideria Setya Mentari berjudul “*Harga Sebuah Pilihan; Strategi PKS dan Partai Demokrat Menata Raut Wajah*”, Dari sisi ideologi partai dakwah, PKS mengalami pergeseran yang tadinya berbasis tarbiyah atau kaderisasi menjadi partai terbuka ini terjadi menjelang pemilu 2009, yang mengiklankan partai dengan tema pluralitas etnic dan agama menunjukkan arah keterbukaan partai. Pergeseran itu juga dapat diamati antara anggaran rumah tangga PKS tahun 2005 yang menyatakan bahwa anggota PKS wajib berikrar (berbai’at) setiap melewati jenjang kaderisasi, (bahkan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah) dan sementara itu AD/ART partai menjelang pemilu 2014 hanya menyatakan kewajiban berikrar dan berpegang teguh pada AD/ART, peraturan dan setia pada pemimpin partai (Mentari, 2018).

Dalam buku karya Firman Noor, berjudul *Perpecahan dan Soliditas partai islam; Kasus PKB dan PKS di Dekade Pertama Reformasi*, dijelaskan bahwa pada pemilu 2004 PKS meraih suara 8,3 juta setara 45 kursi DPR RI, menjadi enam besar dari 18 partai yang ada di senayan dan Dr. Hidayat Nurwahid menjadi ketua MPR RI. Dan menjadi sekutu Partai Demokrat sebagai pemenang pemilihan presiden pada pemilu 2004 dan 2009 dimana partai partai Islam berkualitas mendukung pasangan Sby dan Boediono. Yaitu PKS, PAN, PPP, dan PKB. Dan PKS meraih 8,2 juta suara menjadikannya empat besar di senayan. Dan menangnya Sby-Boediono menyediakan 4 kursi

menteri. Menteri Pertanian yaitu Suswono, Menteri Sosial yaitu Salim Seggaf Aljufri, Menteri Komunikasi dan Informatika yaitu Tifatul Sembiring, dan Kementrian Riset dan Teknologi yaitu Suharna Surapranata.

Selain ini para pentolan PKS yang telah malang melintang di belantikan politik Indonesia terlihat merupakan orang orang moderat dan nasionalis secara pemikiran dan latar belakang.

Misalnya Hilmi Aminuddin dan Salim Segaf Al Jufri yang pernah dan menjabat posisi ketua majeis syuro hingga hari ini. Salim Segaf Sendiri adalah seorang Habib penganut Ahlusunnah Wal Jamaah, dan keturunan Habib Idrus atau Guru Tua pendiri alkhairaat (gerakan moderat terbesar di Indonesia Timur) dan salim sendiri adalah alumni Alkhairat, meskipun dia lulusan s1 s2 dan s3 Universitas Madinah tetapi nyatanya iya sangat Ahlusunnah.

Kemudian Hidayat Nurwahid presiden kedua PKS dan mantan ketua MPR dan Anis Matta dua tokoh yang pernah menjabat presiden partai PKS adalah orang yang berasal dari keluarga Muhammadiyah dan alumni lembaga pendidikan Muhammadiyah. Anis matta misalnya yang lulusan ponpes Muhammadiyah Gombara Pangkep Sulawesi Selatan dan alumni LIPIA Jakarta namun Pendidikannya tidak lantas menjadikannya wahabi atau radikal, bahkan Anis Matta sendiri mengakui bahwa ia terpilih dan menang di Daerah Pemilihannya karena ceramah Maulid Nabi saw.

Selain itu ada Rahmat Abdullah alumni Universitas As Syafi'iyah Jakarta, Dr. Nurmahmudi Ismail mantan ketua umum (presiden) partai keadilan lulusan universitas A&M Texas, Tifatul Sembiring presiden kedua Partai Keadilan, alumni Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer (STIK&K) Jakarta, Anis Matta Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai PKS alumni LIPIA Jakarta (Noor, 2015).

Hal ini menunjukkan beragamnya latar belakang para tokoh tokoh besar PKS. Artinya jika hari ini dalam percaturan politik

ada yang ingin menghantam kubu Anies - Muhaimin dengan menuduh PKS membawa ide *Nation State*, itu hanyalah strategi klasik membunuh karakter lawan politik yang intinya mereka adalah kaki tangan rezim yang tidak mau kelompok Islam menang di negeri ini.

Dalam buku karya Imdadun Rahmat berjudul *Ideologi Politik PKS; dari Mesjid Kampus ke Gedung Parlemen*, iya mengutip ucapan mantan Ketua Dewan Syuro sekaligus pendiri partai PKS yaitu KH. Hilmi Aminuddin bahwa gerakan berbau agama yang menentang keniscayaan keberagaman akan luluhlanta. Dan menurut Imaduddin Rahmat bahwa PKS dewasa ini sangat jauh berbeda dengan Ikwanul Muslimin yang dipengaruhi ide Abu A'la Al Maududi dan Sayyid Qutb yang bercita cita membangun *nation state*. PKS bertransformasi dari partai kader menjadi partai terbuka berusaha memperbesar partai dan memperjuangkan penerapan Syariah Islam dengan cara legal dan formal (Rahmat, 2008).

Diskusi

Partai PKB dan PKS sekilas sama bila dilihat sebagai gerakan politik yang membranding dirinya dengan identitas kaum agamis, Namun PKB agak berbeda dengan PKS dimana sejak lama iya berdiri memang tidak menjadikan Islam sebagai Ideologi partai, PKB menjadikan Pancasila sebagai ideologinya.

PKS juga sebenarnya adalah partai yang menganut ideologi Islam dimana dalam AD/ARTnya mencantumkan keharusan tunduk para Alquran dan Hadis, namun seiring berjalannya waktu partai ini menjadi pragmatis dan realistik yang ingin menjadi terbuka agar pemilihnya meningkat.

PKS yang tadinya menjadikan alquran dan hadis sebagai AD/ART yang mengikat para kadernya, berubah menjadi hanya setia kepada pimpinan dan partai saja, hal ini mungkin disebabkan juga oleh pluralitas yang ada di indonesia, karena PKS juga bernafsu menguasai lumbung suara dimana banyak orang non muslim, seperti Papua, Ambon, NTT, dan Manado.

Sementara dari segi akur tidak akurnya kedua partai ini, adalah intrik politik, sebab koalisi PKB-PKS bukan kali pertama, epatnya di era SBY-JK dan Sby-Boediyono partai partai Islam menjadi koalisi gemuk bagi SBY dan wakilnya termasuk dukungan PKS dan PKB.

Bila ditilik dari sudut pandang teori Max Weber maka baik PKB (NU) dan PKS menganut gaya kekuasaan kharismatik dimana branding dan tokoh tokoh agamis menjadi daya tariknya. Tetapi dari sisi kekuasaan tradisional, hanya PKB (NU) yang menganutnya karena warna pesantren sebagai basis suara PKB (NU) di kelola secara turun temurun. Sementara PKS tidak menganutnya karena banyak kader dan tokoh tokoh PKS berasal dari muhammadiyah sehingga gaya kekuasaan tradisional tidak mereka anut karena prisip muhammadiyah yang egaliter.

Ketegangan yang terjadi antara NU dan PKS kemudian timbul kembali namun dalam periode dan situasi berbeda. Paling tidak ada 2 serangan dari tokoh tokoh NU yang mencoba menghantam PKS.

Pertama, yaitu konflik lama Muhaimin vs trah Gus Dur, misalnya pasca deklarasi Anies - Muhaimin untuk capres dan cawapres 2024, Yenni Wahid yang juga anak Gus Dur tiba tiba tampil secara terang terangan di media dengan mengatakan bahwa kandidat cawapres sekarang tinggal 2 yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo saja, sedangkan Anies tidak dianggap lagi karena berkoalisi dengan Muhaimin Iskandar. Disini terlihat kubu Yenni Wahid berusaha merusak image Muhaimin dengan memframing dan membentuk opini publik pbahwa Muhaimin itu adalah pencuri dan suka mengkudeta gurunya sendiri yaitu Gus Dur, agar masyarakat membenci Muhaimin.

Sikap Yenni Wahid ini bisa dianggap sebagai dendam politis dimana perseteruan internal PKB yang telah inkrah di mahkamah agung yang memenangkan Muhaimin, seolah olah belum diterima dan masih menjadi dendam kesumat. Dan sifat iri dari kubu Yenni Wahid dimana Muhaimin berhasil

mendapatkan momentum untuk terbang dilangit politik lebih tinggi.

Kedua, serangan pada Muhaimin datang dari kekuasaan legal yaitu Menteri Agama yang berkata bahwa memilih AMIN adalah bid'ah, dan diikuti oleh kekuasaan kharismatik yaitu ketua PBNU Khalil Tsaquf, yang menyerang Muhaimin bahwa jangan bawa bawa PBNU dalam pusaran politik praktis, namun Muhaimin menjawab bahwa saya tidak pernah membawa NU ke politik praktis tetapi bahwa sejak lahir saya sudah NU, malah Muhaimin berkelakar bahwa PBNU yang dimaksudnya adalah Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang Undang Dasar 1945. Selain itu juga beberapa tokoh NU seperti ketua PWNU Jawa Timur KH. Marzuki Mustamar terang terangan melarang jamaahnya memilih PKS, dan Islah Bahrawi dari Densus 88 juga menyerang PKS sebagai sarang Ikhwanul Muslimin.

Kalau kita tarik dari semua sikap public tokoh tokoh NU di atas maka dapat dibaca mereka adalah pro Trah Gus Dur dan bagian dari rezim berkuasa, sehingga suatu yang wajar jika mereka menyerang Anies - Muhaimin, yaitu karena Muhaimin adalah musuh bagi trah Gus Dur dan Anies adalah ancaman terbesar dan pesaing terkuat bagi Ganjar Pranowo sebagai capres yang dikehendaki razim.

Bila dianalisis dengan kacamata teori kubus kekuasaan atau *powercub*. **Pertama**, kekuasaan trah *gus dur* yang secara tradisional dan kharismatik menunjukkan gaya *visible power*, (konflik kekuatan terbuka). **Kedua**, dimensi *close space* yaitu konflik internal antara kader NU yang meluas ke public karena menjadikan media sebagai medan konflik. **Ketiga**, level konflik ini menjadi konsumsi nasional karena pihak yang berseteru memegang posisi strategis di panggung politik nasional, dan menjadi konflik internasional mana kala para simpatisan trah Gus Dur menyerang kubu Anies - Muhaimin karena disokong PKS yang dituduh berideologi Ikhwanul Muslimin radikal berbahaya.

Bila digeneralisasi dengan teori hegemoni Gramsci. Maka dikatakan bahwa NU (trah gus dur dan simpatisannya) menyerang dan ingin mengalahkan kubu Anies Muhaimin dengan menggunakan 3 dimensi kekuasaan sekaligus yaitu kekuasaan tradisional dengan membranding tuduhan pada Muhaimin sebagai pengkudeta Gus Dur dengan baju sakralitas kiyai sekaligus menggunakan kekuasaan kharismatik yaitu sosok sosok petinggi NU yang kharis matik seperti Chalil staquf ketua PBNU, dan melibatkan kekuasaan legal yaitu intervensi Menteri Agama Gus Yagut sebagai tokoh yang bersifat legal.

NU (trah gus dur dan simpatisanya) berusaha mengungkit isu lama Muhaimin sebagai pelaku kudeta Gus Dur dan menyerang koalisi Anies - Muhaimin sebagai “berbahaya” karena disokong oleh PKS yang notabene adalah antagonis dan partai oposisi bagi rezim berkuasa yang merasa terancam.

Kekhawatiran ini telah terjawab dengan menangnya muhaimin di mahkamah agung, dan kubu gus dur tidak pantas mengklaim pkb didirikan oleh Gus Dur saja, karena pendiri PKB adalah kombinasi dari banyak tokoh tokoh ulama NU, dan banyak hari ini tokoh tokoh pendiri PKB dari kiyai kiyai NU yang tidak dapat jabatan di PKB namun tidak lantas menagih saham yang telah mereka tanam.

Selain itu, histori koalisi PKS dan PKB yang pernah terjadi di era SBY bahkan dengan 4 orang menteri dalam kabinet adalah *track record* bahwa konflik PKB dan PKS hari ini adalah buatan, dan PKS terbukti bukan partai Ikhwanul Muslimin yang ingin membangun *nation state* ala Abu A’la Al Maududi dan Sayyid Qutub, akan tetapi PKS telah jadi partai terbuka, bahkan kader kadernya mayoritas berasal dari kalangan NU dan Muhammadiyah kultural, soal kaderisasi Tarbiyah ala Ikhwan yang diadopsi PKS itu bukan alasan untuk mengatakan PKS berbahaya di Indonesia. Dan jika memang para kader NU masih berat mendukung anies karena didukung PKS, maka yang terpenting adalah Anies bukanlah kader asli PKS iya hanya mendapat dukungan.

Kesimpulan

Pergumulan konflik NU dan PKS adalah akibat pembelahan internal dari PKB itu sendiri akibat konflik trah Gus Dur vs Muhaimin, dan konflik melibatkan semua lapisan kekuasaan baik tradisional, kharismatik, dan legal. Baik tingkat lokal yaitu PWNU Jawa Timur, lalu nasional karena melibatkan Menteri Agama dan Ketua PBNU, dan menjadi bincangan internasional karena mengangkat isu Ikhwanul Muslimin yang merupakan gerakan transnasional.

Koalisi Anies - Muhaimin diserang dengan wacana lama yaitu kudeta Gus Dur oleh Muhaimin dan isu PKS sarang Ikhwanul Muslimin adalah isu yang sudah basi, namun kubu NU trah Gus Dur bersikap demikian karena ditunggangi rezim atau mereka masih cari makan pada rezim yang sudah hampir berakhir kekuasaannya ini. Dan terlihat ada konflik tersembunyi yaitu konflik NU dan Muhammadiyah karena PKS mempunyai kader yang kebanyakan dari kalangan Muhammadiyah.

Oleh Karena itu kami memberikan saran agar Semua kader NU perlu bersatu dan mengenyampikan konflik lama Gus Dur - Muhaimin, karena partai Islam perlu bersatu karena rezim Jokowi sudah lama berkuasa dan perlu perubahan karena masih banyak kebijakan kebijakan di era Jokowi yang kental dengan nepotisme dan keberpihakan para oligarki.

Daftar Rujukan

- Arifin, I. (2008). *Kyai dan Politik; Studi Kasus Perilaku Politik Kiai dalam Konflik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pasca Muktamar II Semarang*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Basyir, Ach. (2014). *Ideologi Politik Dilematis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) antara Gerakan Tarbiyah dan Pragmatisme*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta.
- Chalik, A. (2016). *Pertarungan Elite dalam Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Damanik, A. S. (2013). *Fenomena Partai Keadilan; Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*. Jakarta Selatan: Teraju.

Endraswara, S. (2018). *Metodologi Penelitian Pragmatik Sastra*. Yogyakarta: Textium.

Firmansyah. (2021). HIJRAH, BETWEEN SOCIOLOGICAL AND THEOLOGICAL PHENOMENON. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, XVIII(1), 29–46. <https://doi.org/DOI: 10.22515/ajpif.v18i1.3707>

George Ritzer. (2014). *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hadiwijoyo, S. S. (2013). *Daerah Istimewa Yogyakarta: Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Halim, A. (2013). *Relasi Islam Politik dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.

Jundy, A. (1993). *Pembaratan di Dunia Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Khadhar, L. I. (2005). *Ketika Barat Memfitnah Islam*. Jakarta: Gema Insani.

Mentari, D. S. (2018). *Harga Sebuah Pilihan; Strategi PKS dan Partai Demokrat Menata Raut Wajah*. Yogyakarta: Penerbit Polgov.

Miftahuddin. (2008). *Pengaruh Ideologi Ikhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta.

Moh. Nurhakim. (2011). *Gerakan Revivalisme Islam dan Wacana Penerapan Syariah di Indonesia; Telaah Pengalaman PKS dan Salafi*. *Ulul Albab*, 12(1).

Muhammad Nur Safii. (2020). *Konsep Tauhid Salafi dalam Buku Mulia dengan Manhaj Salaf Karya Yazid bin Abdul Qadir Jawaz*. UIN Sunan Ampel Surabaya.

- Munawwir, I. (1985). *Mengapa Islam Dilanda Perpecahan*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Noor, F. (2015). *Perpecahan dan Soliditas partai islam; Kasus PKB dan PKS di Dekade Pertama Reformasi*. Jakarta: LIPI Press.
- Nurdin, M. A., Saputra, A. T. D., & Prayitno, A. (2019). *Prahara Partai Islam; Komparasi Konflik Internal PPP dan PKS (1 ed.)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Panipahan, F. (2020). *Aktivitas Daring: Mempertegas Relasi Manusia dan Tuhan*. Diambil dari Arrahim.id website: <https://arrahim.id/firman/aktivitas-daring-mempertegas-relasi-manusia-pada-tuhan/>
- Purnamasari D.M. (2019). *Survei LIPI: Masyarakat Memandang Politik Uang Bagian dari Pemilu, Tidak Dilarang*. Diambil 16 November 2020, dari Kompas.com website: <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/29/05213291/survei-lipi-masyarakat-memandang-politik-uang-bagian-dari-pemilu-tidak?page=all>
- Rahmat, M. I. (2008). *Ideologi Politik PKS; dari Mesjid Kampus ke Gedung Parlemen (1 ed.)*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
- Romli, L. (2006). *Islam Yes Partai Islam yes; Sejarah Perkembangan Partai Partai Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saputra, A. T. D. (2019). *Pergolakan Partai Islam di Tahun Politik (1 ed.)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Shihab, A. (1999). *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama (5 ed.)*. Bandung: Mizan.
- Suadi Asyari. (2010). *Nalar Politik NU dan Muhammadiyah; Over Crossing Jawa Sentris*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Edisi Revi)*. Bandung: Alfabeta.

Sumartana, Th. (2005). Pemberlakuan syariat islam di indonesia, dalam buku Etika Politik dalam Konteks Indonesia. Yogyakarta: Kanisius.

Tempo. (2023, Oktober 15). Tempo, edisi 15 oktober 2023.

Wahid, A. (2009). Ilusi Negara Islam; Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia. Jakarta: The Wahid Institute.

Wahid, N. (2019). Jejak Dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Memasuki Muhammadiyah; Mencermati Kasus di Yogyakarta Sebagai Fenomena Politik Dakwah. Jurnal Sosiologi Agama, 13(2).

Wahyudi, A. (2013). PKS dan NU (Studi Kasus Tentang Penguatan Jejaring PKS Dalam Menembus Basis NU di Kabupaten Trenggalek dalam Pemilihan Umum 2009). Universitas Airlangga, Surabaya.

Woodward, M. R. (1998). Jalan baru islam; memetakan paradigma mutakhir islam di indonesia. Bandung: Mizan.

Yohanes Sehandi. (2016). Mengenal 25 Teori Sastra. Yogyakarta: Penerbit Ombak.